

2025



# PEMERINTAH KOTA DENPASAR

## LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN III TAHUN 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana





**Laporan Triwulan III Pengelolaan Risiko  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Denpasar Tahun 2025**

**BAB I**

**Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Pengelolaan risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Pengelolaan risiko dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah merupakan Unit Pemilik Risiko yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.

**B. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- e. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3).
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 188.45/09/DP3AP2KB/2022 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar
- g. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 188.45/10/DP3AP2KB/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar

#### C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

#### D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025.

## BAB II

### Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

#### Pemerintah Daerah

#### A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan III

##### 1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 76 risiko (polulasi risiko), yang terdiri dari 9 risiko strategis OPD, 23 risiko operasional OPD dan 44 risiko fraud dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1**.

##### 2. Analisis risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 76 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 4 risiko (5,26% dari 76 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 2**.
- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 4 risiko atau 100 % dari jumlah/populasi risiko prioritas).
- c. Sebanyak 4 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 4 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

#### B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan III

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada Triwulan III sebanyak 2 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 4**.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada Triwulan III sebanyak 2 kegiatan atau 100% dari 2 kegiatan pengendalian pada Triwulan III. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 5**.
3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

### BAB III

#### Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah pada Triwulan III.

### BAB IV

#### Monitoring Risiko dan RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul pada Triwulan III. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6.

### BAB V


#### Penutup

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Triwulan III dapat dilihat bahwa tidak terdapat risiko yang muncul pada Triwulan III.

Analisis manajemen risiko harus dilaksanakan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan.

Denpasar, 1 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,

  
Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660311199503 2 001



# LAMPIRAN

Dokumentasi Pemasangan CCTV:



**Form 4**  
**Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis	: (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang
Urusan Pemerintahan	: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemda</b>				
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
1	Tidak tercapainya pemenuhan data untuk penilaian APE	RSO.25.08.13.01	3	2	6
2	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	RSO.25.08.13.02	2	1	2
3	Pendampingan puspa desa /lurah belum terlaksana dengan maksimal	RSO.25.08.13.03	2	4	8
4	Kurang maksimalnya hasil Buku Profil Statistik Gender	RSO.25.08.13.04	4	3	12
5	Tidak tercapainya indikator Kota Layak Anak	RSO.25.08.13.05	2	1	2
6	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	RSO.25.08.13.06	2	1	2
7	Penyediaan data tidak terpenuhi	RSO.25.14.13.07	2	1	2
8	Target program tidak dapat tercapai	RSO.25.14.13.08	2	3	6
9	Terjadinya pergantian kader pada Tahun Anggaran berjalan	RSO.25.14.13.09	4	2	8
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				
1	Keterlambatan pengumpulan Dokumen Penganggaran Berbasis Gender	ROO.25.08.13.01	2	3	6
2	Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	ROO.25.08.13.02	5	3	15
3	Peserta yang ditugaskan hadir dalam kegiatan adalah orang yang sudah pernah ditugaskan sebelumnya	ROO.25.08.13.03	2	1	2
4	Terdapat potensi benturan kepentingan yaitu pemberi layanan menawarkan jasa konsultasi psikologi/ hukum di luar institusi resmi	ROO.25.08.13.04	5	3	15
5	keterbatasan peserta yang dapat diberikan pelatihan	ROO.25.08.13.05	2	1	2
6	Peserta yang hadir lebih banyak adalah orang yang sama dengan peserta yang hadir pada tahun sebelumnya	ROO.25.08.13.06	2	1	2
7	Peserta yang hadir lebih banyak perempuan	ROO.25.08.13.07	2	1	2
8	Keterlambatan pengumpulan data statistik gender	ROO.25.08.13.08	4	3	12
9	Kehadiran peserta tidak sesuai dengan kuota peserta	ROO.25.08.13.09	2	4	8
10	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.25.08.13.10	2	4	8
11	Keterbatasan kuota pemberian edukasi kepada seluruh sekolah tingkat SD dan SMP	ROO.25.08.13.11	2	1	2
12	keterbatasan peserta yang dapat diberikan pelatihan	ROO.25.08.13.12	2	1	2
13	Keterlambatan pembayaran honor pihak penerima operasional	ROO.25.14.13.13	3	3	9
14	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu/ tidak sesuai dengan kalender kegiatan	ROO.25.14.13.14	2	1	2
15	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	ROO.25.14.13.15	4	3	12

16	Pembayaran honorarium BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak sesuai dengan SK yang berlaku	ROO.25.14.13.16	5	3	15
17	Pelaporan Kegiatan yang tidak tepat waktu	ROO.25.14.13.17	2	1	2
18	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.08.13.18	2	1	2
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.25.08.13.19	2	1	2
20	Serapan anggaran tidak optimal	ROO.25.08.13.20	2	1	2
21	Adanya standar harga barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam perwali	ROO.25.08.13.21	3	1	3
22	Spesifikasi barang pada e katalog tidak sesuai dengan DPA	ROO.25.08.13.22	2	3	6
23	Terdapat selisih hasil pengukuran pemeliharaan gedung dan bangunan dengan RAB	ROO.25.08.13.23	3	3	9
<b>III</b>	<b>Risiko Fraud OPD</b>				
1	Dokumen rencana anggaran tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya	RF.25.08.13.01	2	1	2
2	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.02	2	1	2
3	Pejabat menyusun anggaran belum mengacu pada data dan kebutuhan	RF.25.08.13.03	2	1	2
4	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.04	2	1	2
5	Pejabat menyusun anggaran belum mengacu pada data dan kebutuhan	RF.25.08.13.05			
6	Pejabat menyusun anggaran belum mengacu pada data dan kebutuhan	RF.25.08.13.06	2	1	2
7	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.07	2	1	2
8	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.08	2	1	2
9	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.09	2	1	2
10	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.10	2	1	2
11	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.11	2	1	2
12	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.12	2	1	2
13	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.13	2	1	2
14	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.14	2	1	2
15	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.15	2	1	2
16	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.16	2	1	2
17	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.17	2	1	2
18	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.18	2	1	2

19	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.19	2	1	2
20	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.20	2	1	2
21	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.21	2	1	2
22	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.22	2	1	2
23	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.23	2	1	2
24	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.24	2	1	2
25	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.14.13.25	2	1	2
26	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.14.13.26	2	1	2
27	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.14.13.27	2	1	2
28	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.14.13.28	2	1	2
29	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.14.13.29	5	3	15
30	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.14.13.30	2	1	2
31	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.14.13.31	2	1	2
32	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.14.13.32	2	1	2
33	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.14.13.33	2	1	2
34	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.14.13.34	2	1	2
35	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan	RF.25.08.13.35	2	1	2
36	Gratifikasi dalam proses kenaikan gaji berkala	RF.25.08.13.36	2	1	2
37	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.37	2	1	2
38	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.38	2	1	2
39	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.08.13.39	3	3	9
40	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.40	2	1	2
41	Dokumen belanja tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya	RF.25.08.13.41	2	1	2
42	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.42	2	1	2
43	Dokumen belanja pemeliharaan tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya	RF.25.08.13.43	2	1	2

44	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.44	2	1	2
----	--	----------------	---	---	---

Denpasar, 1 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Denpasar



**Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19660311 199503 2 001

**Form 5**  
**Daftar Risiko Prioritas PEMDA**

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2025				
Tujuan Strategis		: (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang				
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
	-					
II	Risiko Strategis OPD					
	-					
III	Risiko Operasional OPD					
1	Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	ROO.25.08.13.02	15	Kabid KHPKKDI	Kurangnya pengawasan	1. Temuan dan Pengembalian dana
2	Terdapat potensi benturan kepentingan yaitu pemberi layanan menawarkan jasa konsultasi psikologi/ hukum di luar institusi resmi	ROO.25.08.13.04	15	Kepala UPTD PPA	1. Kurangnya pengawasan, 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi/ golongan	1. Timbulnya praktik korupsi dan kolusi 2. Menimbulkan kerugian keuangan negara
3	Pembayaran honorarium BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak sesuai dengan SK yang berlaku	ROO.25.14.13.16	15	Kabid KBKKK	1. Keterlambatan pembuatan SK; 2. SK tidak berlaku surut	Kelebihan pembayaran honorarium
IV	Risiko Fraud OPD					
1	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.14.13.29	15	Sekda, UKPBJ, DP3AP2KB, Inspektorat	Masih perlunya peningkatan koordinasi bersama asosiasi usaha sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang berdampak pada ketertarikan pelaku usaha untuk mendaftar sebagai calon penyedia pada etalase katalog lokal	Adanya potensi gratifikasi dalam pengadaan

Denpasar, 1 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Denpasar



**Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. SI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199503 2 001

Form 7  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang					
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
-							
II	Risiko Strategis OPD						
-							
III	Risiko Operasional OPD						
1	Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	ROO.25.08.13.02	Penyesuaian RKA melalui Desk RKA	Pengawasan pencairan dana oleh Kasubag Keuangan	Koordinasi bidang terkait dengan Kasubag Keuangan	Kabid KHPKKDI	TW II
2	Terdapat potensi benturan kepentingan yaitu pemberi layanan menawarkan jasa konsultasi psikologi/ hukum di luar institusi resmi	ROO.25.08.13.04	Pemasangan CCTV pada Ruang Layanan UPTD	Penguatan Pengawasan melalui perbaikan Standar Pelayanan Publik dan Pemantauan CCTV di Ruang Layanan	Perbaikan Standar Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik, Pemantauan CCTV	Kepala Dinas, Ka UPTD PPA	TW I-IV
3	Pembayaran honorarium BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak sesuai dengan SK yang berlaku	ROO.25.14.13.16	Pembuatan SK oleh pelaksana teknis	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Pembuatan SK	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Pembuatan SK	Kabid KBKKK	TW I
IV	Risiko Fraud OPD						
1	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.14.13.29	Penetapan spesifikasi teknis sesuai juknis dari kementerian	Koordinasi dengan Bagian PBJ dan inspektorat	Koordinasi dengan Bagian PBJ dan inspektorat	Kepala Dinas, Kabid KBKKK	TW I

Denpasar, 1 Oktober 2025  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Denpasar

Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660311 199503 2 001



Form 8  
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tujuan Strategis		: 2025 : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang					
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Koordinasi bidang terkait dengan Kasubag Keuangan	Koordinasi	Kasubag Keuangan	Bidang KHPKDI	TW II	17 Juni 2025	Telah dilaksanakan
2	Perbaikan Standar Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik, Pemantauan CCTV	Rapat dan pengawasan	Penerima Layanan	DP3AP2KB	TW I-IV	TW II	Pemantauan CCTV Secara Berkala
3	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Pembuatan SK	Koordinasi	Bagian Hukum	DP3AP2KB	TW I	2 Januari 2025	Telah dilaporkan pada Laporan TW I
4	Koordinasi dengan Bagian PBJ dan Inspektorat	Koordinasi	Bagian PBJ	DP3AP2KB	TW I	11 Februari 2025	Telah dilaporkan pada Laporan TW I

Denpasar, 1 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

**Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si**

Pembina Utama Muda  
NIP : 19660311 199503 2 001



## RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2025 (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang				
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Koordinasi bidang terkait dengan Kasubag Keuangan	Monev	Kepala Dinas	TW II	17 Juni 2025	Telah dilaksanakan
2	Perbaikan Standar Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik, Pemantauan CCTV	Rapat	Kepala Dinas	TW II-IV	21 Januari 2025, TW II, TW III	Telah dilaksanakan
3	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Pembuatan SK	Rapat	Kepala Dinas	TW I	2 Januari 2025	Telah dilaksanakan
4	Koordinasi dengan Bagian PBJ dan inspektorat	Rapat	Kepala Dinas	TW I	11 Februari 2025	Telah dilaksanakan

Denpasar, 1 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Denpasar

Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19660311199503 2 002



PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : 2025  
 Tujuan Strategis : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang  
 Urusan Pemerintahan : (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
1										
	Nihil									
II	Risiko Strategis OPD									
1										
	Nihil									
III	Risiko Operasional OPD									
1	Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	ROO.25.08.13.02	-							
2	Terdapat potensi benturan kepentingan yaitu pemberi layanan menawarkan jasa konsultasi psikologi/ hukum di luar institusi resmi	ROO.25.08.13.04	-							
3	Pembayaran honorarium BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak sesuai dengan SK yang berlaku	ROO.25.14.13.16	-							
4	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.14.13.29	-							
	Nihil									

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan